

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	.....
Media Online	Tribun News Jateng

Wilayah: Kabupaten Kudus

## BPPKAD Kudus Berhasil Kumpulkan Rp91,7 Miliar Untuk Penanganan Covid-19 Dari Refocusing Anggaran

<https://jateng.tribunnews.com/2021/03/11/bppkad-kudus-berhasil-kumpulkan-rp-91-7-miliar-untuk-penanganan-covid-19-dari-refocusing-anggaran?page=all>

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 91,7 miliar dari APBI 2021 untuk penanganan pandemi.

Kepala BPPKAD Kudus, Eko Djumartono mengatakan, refocusing anggaran dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

"Ini terjadi di semua daerah, karena pemerintah pusat tidak ada uang lagi, maka sekarang dibebankan ke pemerintah daerah," jelas dia, usai rapat pimpinan, di Gedung Lantai IV Setda Kudus, Rabu (10/3/2021).

Adapun alokasi anggaran yang dialihkan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus mencapai Rp 91,7 miliar.

Anggaran itu akan dipakai untuk insentif tenaga kesehatan, vaksinasi, dan lainnya yang sebelumnya ditanggung pemerintah pusat.

"Dulu insentif tenaga kesehatan ditanggung pemerintah pusat, sekarang jadi kewenangan daerah," ujar dia.

Dia menyampaikan, alokasi anggaran yang paling banyak dipotong berasal dari alokasi kesejahteraan masyarakat (Kesra).

Anggaran hibah untuk pondok pesantren yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 71 miliar, akan digeser sekitar 22 persen untuk penanganan Covid-19.

"Kesra itu tota anggarannya mencapai Rp 71 miliar, akan dialokasikan 22 persen atau sekitar Rp 15 miliar untuk dialihkan ke DKK karena ada refocusing anggaran," ujar dia.

Tak hanya Kesra, kata dia, semua organisasi perangkat daerah (OPD) juga terkena imbas dari refocusing anggaran itu.

Namun jumlah anggaran yang dipangkas masing-masing OPD berbeda sesuai kebutuhannya.

"Karena mereka sendiri yang mengerti skala prioritas anggarannya," ujar dia.

Pihaknya mencontohkan, alokasi BPPKAD Kudus yang dipangkas habis di antaranya yakni anggaran jamuan dan perawatan mobil.

Eko memastikan tidak akan memberikan suguhan berupa makanan ringan atau minum karena refocusing anggaran tersebut.

"Biasanya kalau rapat kami beri suguhan, tapi sekarang sudah nggak ada. Yang diundang juga dari internal jadi tidak masalah," ujar dia.

Berbeda halnya dengan jamuan makan dan minum pada Bagian Umum yang tidak bisa dipangkas.

Pasalnya tamu yang diundang biasanya dari eksternal sehingga perlu diberi suguhan makanan dan minuman.

"Kalau saya tamu sendiri, kalau nggak diberi suguhan tidak apa-apa. Kalau bagian umum rasanya tidak etis," jelas dia. (raf)